



Rabu, 31 Mei 2023

Siaran Pers

Akhiri Sidang AIPACODD ke-6, Parlemen Anggota AIPA Hasilkan Resolusi Dukungan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif untuk ASEAN Bebas Narkoba

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:
Ged. Nusantara III,
Lt. 4Jl. Jend. Gatot
Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:
[@bksapdpri](https://twitter.com/bksapdpri)

Instagram:
[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP DPR RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negaralain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut,
silakan menghubungi Biro
KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

Jalannya rangkaian sesi Sidang ke-6 ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs* (AIPACODD) pada 30-31 Mei 2023 di Lido, Bogor dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon dan Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana. Sidang menghadirkan panelis dari organisasi internasional *United Nations Officer on Drugs and Crime* (UNODC), akademisi (Guru Besar Universitas Atma Jaya) dan *Trainer Specialist* Badan Narkotika Nasional RI untuk mendapatkan masukan tentang tema sidang “*Supporting Inclusive Economic Growth for Drug-Free ASEAN*”.

Melihat sejarah komitmen Parlemen Anggota AIPA dalam memerangi penyalahgunaan narkotika dan perdagangan obat-obatan terlarang, sidang mendengarkan paparan *Country Progress Report* dari masing-masing Parlemen Anggota AIPA serta membahas resolusi yang menekankan peran vital badan-badan sektoral ASEAN dalam menangani perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dalam lingkup regional. Sidang juga menyoroti faktor sosio-ekonomi, termasuk perbedaan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan, sebagai akar penyebab yang memotivasi individu, khususnya kaum muda dan kelompok terpinggirkan, untuk terlibat dalam penggunaan narkotika. Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, resolusi mendesak ASEAN dan AIPA untuk memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk mitra dialog dan organisasi internasional, dalam memerangi perdagangan narkotika dan kejahatan terkait. Resolusi juga menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman di antara badan-badan narkotika nasional mengenai dampak ekonomi dari konektivitas regional pada pasokan dan permintaan obat-obatan terlarang. Upaya bersama untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dan meningkatkan kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan narkotika juga menjadi salah satu poin dari resolusi yang dihasilkan.

Menyadari pentingnya intervensi berbasis komunitas, resolusi tersebut merekomendasikan untuk memprioritaskan peningkatan kualitas hidup bagi individu yang berjuang dengan gangguan penggunaan napza. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui intervensi berbasis komunitas yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi mantan pengguna ke dalam masyarakat.

Melalui Sidang AIPACODD ini, upaya kolektif Parlemen Anggota AIPA yang bertujuan untuk menciptakan komunitas ASEAN yang bebas narkotika dapat direalisasikan untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang dan menjaga pertumbuhan ekonomi kawasan.
